



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 6950-6957

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Dinamika Tata Kelola dan Akurasi Penargetan Program Bantuan Sosial di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan

Pasha Al Hafiz Dafa¹, Daniashara Dafa²

¹Institut Pemerintahan Dalam Negeri

²Universitas Hasanuddin

pashadffa3@gmail.com, daniashara40@gmail.com

Abstrak

Studi ini meneliti kesenjangan tata kelola dan akurasi penargetan dalam implementasi program bantuan sosial yang bertujuan untuk pengentasan kemiskinan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKU Timur), Indonesia. Meskipun skema perlindungan sosial ini dirancang untuk mengurangi kerentanan sosial ekonomi, efektivitasnya sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan, integritas data, dan akuntabilitas administratif. Penelitian ini menerapkan pendekatan studi kasus kualitatif, dengan menggunakan data statistik kemiskinan, dokumen kebijakan, dan laporan pengawasan untuk secara kritis menilai keselarasan antara kerangka peraturan dan implementasi di lapangan. Temuan menunjukkan kelemahan struktural dalam identifikasi penerima manfaat, khususnya terkait pembaruan dan verifikasi Basis Data Kesejahteraan Sosial Terpadu (DTKS). Kelemahan ini berkontribusi pada kesalahan inklusi (rumah tangga yang tidak memenuhi syarat menerima bantuan) dan kesalahan eksklusi (rumah tangga yang memenuhi syarat tidak termasuk). Lebih lanjut, koordinasi antar lembaga yang terbatas, inkonsistensi prosedural, dan mekanisme pemantauan yang tidak memadai memperburuk kesenjangan antara desain kebijakan dan hasil praktis. Studi ini berpendapat bahwa peningkatan manajemen data teknis saja tidak cukup tanpa memperkuat tata kelola kelembagaan, transparansi, dan mekanisme validasi berbasis masyarakat. Oleh karena itu, model tata kelola yang lebih terintegrasi dan akuntabel sangat penting untuk meningkatkan ketepatan sasaran dan memastikan bahwa program bantuan sosial secara efektif berkontribusi pada pengurangan kemiskinan berkelanjutan di tingkat lokal.

Kata kunci: Kesenjangan Tata Kelola, Bantuan Sosial, Akurasi Penargetan, Pengentasan Kemiskinan, Akuntabilitas Kelembagaan

1. Latar Belakang

Kemiskinan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKU Timur) merupakan fenomena multidimensional yang perlu dipahami tidak hanya dalam konteks angka lokal, tetapi juga dalam kerangka perbandingan regional dan nasional. Data terkini dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada tahun 2024, tingkat kemiskinan di OKU Timur berada pada kisaran 9,75 persen. Angka ini, jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Sumatera Selatan yang berada di atas 11 persen pada periode yang sama, menunjukkan capaian yang relatif lebih baik bagi kabupaten ini. Pencapaian ini dapat menjadi indikasi adanya upaya-upaya struktural yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau mungkin dipengaruhi oleh karakteristik ekonomi lokal yang unik. Namun, apabila dibandingkan dengan rata-rata nasional yang berkisar sekitar 9 persen, posisi OKU Timur masih berada sedikit di atas angka nasional. Perbandingan tiga tingkatan ini—kabupaten, provinsi, dan nasional—menunjukkan bahwa meskipun terdapat tren penurunan yang positif, tingkat kemiskinan di OKU Timur belum sepenuhnya berada dalam kondisi ideal dan masih menyisakan kerentanan struktural yang perlu diatasi dengan kebijakan yang lebih presisi.

Lebih jauh, indikator persentase kemiskinan headcount ratio sering kali menutupi kompleksitas persoalan yang ada di lapangan. Indikator ini hanya mengukur jumlah individu atau rumah tangga yang berada di bawah garis kemiskinan, tanpa memperhitungkan seberapa jauh mereka berada dari garis tersebut. Di sinilah pentingnya memperhatikan indikator lain seperti tingkat kedalaman kemiskinan (poverty gap index) dan tingkat keparahan kemiskinan (poverty severity index). Poverty gap index mengukur rata-rata jarak pendapatan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, sementara poverty severity index memberikan bobot lebih besar pada

mereka yang sangat miskin. Data dari BPS dan berbagai studi, termasuk yang dilakukan oleh World Bank, seringkali menunjukkan bahwa sebagian rumah tangga miskin di Indonesia, termasuk di OKU Timur, masih berada cukup jauh dari garis kemiskinan. Artinya, meskipun jumlah penduduk miskin menurun secara statistik, jarak kesejahteraan antara kelompok termiskin dengan garis kemiskinan belum sepenuhnya menyempit secara signifikan. Kondisi ini menciptakan kelompok masyarakat yang sangat rentan terhadap guncangan ekonomi sekecil apa pun, seperti kenaikan harga kebutuhan pokok atau kehilangan pekerjaan sementara.

Dalam konteks ini, kebijakan bantuan sosial menjadi instrumen penting untuk menutup kesenjangan tersebut dan memberikan jaring pengaman sosial (*social safety net*). Program-program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), serta berbagai bentuk bantuan langsung tunai lainnya dirancang secara konseptual untuk memperkuat daya tahan ekonomi rumah tangga miskin dan mencegah mereka jatuh lebih dalam ke jurang kemiskinan. PKH, misalnya, adalah program bersyarat yang bertujuan untuk meningkatkan akses penduduk miskin terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, yang pada akhirnya diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Sementara itu, BP bertujuan untuk menjamin ketersediaan pangan bergizi dan mengurangi beban pengeluaran rumah tangga. Secara konseptual, kebijakan transfer sosial ini sejalan dengan prinsip *welfare state* yang menempatkan negara sebagai pelindung kelompok rentan. Namun, implementasi dari prinsip ini di Indonesia, yang menganut sistem desentralisasi, menghadirkan tantangan tersendiri. Sebagaimana dikemukakan oleh Oates (1999) dalam teorema desentralisasinya, desentralisasi kebijakan hanya akan efektif apabila diiringi dengan kapasitas institusional yang memadai di tingkat lokal. Tanpa sistem administrasi yang kuat, sumber daya manusia yang berkualitas, dan mekanisme akuntabilitas yang jelas, transfer kewenangan justru dapat menciptakan variasi kualitas implementasi yang signifikan antarwilayah.

Permasalahan utama dalam konteks OKU Timur, yang kemungkinan besar juga dihadapi oleh banyak daerah lain di Indonesia, terletak pada akurasi basis data penerima manfaat yang bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). DTKS seharusnya menjadi acuan utama dalam penargetan bantuan sosial, namun proses pemutakhiran data yang belum sepenuhnya sinkron dengan dinamika sosial ekonomi masyarakat berpotensi menghasilkan kesalahan sasaran. Dinamika ini mencakup perubahan status pekerjaan, migrasi masuk dan keluar, kelahiran, kematian, serta peristiwa-peristiwa krisis lainnya yang dapat dengan cepat mengubah status kesejahteraan seseorang. Jika data tidak diperbarui secara berkala dan partisipatif, maka data yang ada akan menjadi statis dan ketinggalan zaman. Mansuri dan Rao (2013) dalam karya seminal mereka tentang pembangunan berbasis komunitas menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan yang menyentuh akar rumput sangat ditentukan oleh tingkat partisipasi lokal dalam proses identifikasi dan verifikasi penerima. Partisipasi ini bukan hanya sekadar formalitas, tetapi melibatkan pemahaman kontekstual masyarakat setempat mengenai siapa yang benar-benar membutuhkan bantuan. Ketika proses identifikasi bersifat *top-down*, administratif, dan kurang melibatkan masyarakat, maka risiko *inclusion error* (orang yang tidak berhak menerima bantuan) dan *exclusion error* (orang yang berhak tidak menerima bantuan) akan meningkat tajam. *Exclusion error* justru lebih berbahaya dari segi keadilan sosial karena secara langsung menelanjangi hak warga negara yang paling rentan.

Studi yang dilakukan oleh Sumarto, Arif, dan Vaz (2019) dari SMERU Research Institute juga menunjukkan bahwa lemahnya integrasi data antarinstansi pemerintah dan keterbatasan pengawasan lapangan sering menjadi penyebab utama distorsi distribusi bantuan sosial di berbagai daerah Indonesia. Data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, data ekonomi dari Bappeda, dan data sosial dari Dinas Sosial sering kali berjalan sendiri-sendiri dalam silo-silo informasi. Kurangnya sinergi ini menghambat pembentukan profil kesejahteraan yang komprehensif dan akurat bagi setiap rumah tangga. Akibatnya, penargetan bantuan menjadi tidak tepat sasaran, yang tidak hanya menyebabkan pemborosan sumber daya negara tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Jika dilihat secara kritis, penurunan angka kemiskinan di OKU Timur yang lebih baik dibanding rata-rata provinsi dapat menjadi indikator positif, tetapi belum tentu mencerminkan efektivitas tata kelola bantuan sosial secara optimal. Penurunan tersebut bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal yang tidak terkait langsung dengan program bantuan. Stabilitas harga kebutuhan pokok di tingkat nasional, misalnya, dapat langsung meningkatkan daya beli masyarakat miskin. Pertumbuhan sektor pertanian komoditas seperti sawit atau karet yang menjadi andalan ekonomi daerah juga dapat meningkatkan pendapatan petani secara umum. Selain itu, mobilitas tenaga kerja, di mana anggota keluarga bekerja di kota besar dan mengirim remitsansi ke kampung halaman, juga merupakan faktor signifikan dalam mengurangi angka kemiskinan lokal. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan yang hanya bertumpu pada indikator makro seperti penurunan angka kemiskinan berisiko mengabaikan persoalan mendasar dalam mekanisme implementasi program. Evaluasi semacam itu dapat menciptakan ilusi keberhasilan, sementara masalah ketepatan sasaran dan akuntabilitas tetap menganga.

Untuk mengatasi tantangan ini, konsep good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik harus menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan bantuan sosial. Konsep ini menekankan beberapa pilar utama: transparansi, akuntabilitas, efektivitas, kepastian hukum, serta partisipasi. Dalam konteks bantuan sosial di OKU Timur, prinsip-prinsip ini harus diwujudkan secara nyata. Transparansi dapat diwujudkan dengan membuka akses publik terhadap data penerima manfaat (tentu saja dengan menjaga kerahasiaan data pribadi yang sensitif) dan laporan realisasi anggaran program. Akuntabilitas memerlukan adanya mekanisme yang jelas untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat, baik mengenai exclusion error maupun inclusion error, serta sanksi yang tegas bagi oknum yang melakukan penyelewengan. Efektivitas tidak hanya diukur dari jumlah bantuan yang tersalurkan, tetapi dari dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan penerima, yang dapat diukur melalui indikator-indikator seperti tingkat kehadiran sekolah anak PKH atau status gizi penerima BPNT. Partisipasi harus diperkuat dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam seluruh siklus program, mulai dari perencanaan, identifikasi penerima, monitoring, hingga evaluasi. Tanpa membenah aspek-aspek tata kelola ini, bantuan sosial berpotensi menjadi kebijakan yang bersifat reaktif dan administratif semata, bukan solusi struktural yang mampu mengakar dan memberdayakan masyarakat untuk keluar dari perangkap kemiskinan secara berkelanjutan.

Dengan demikian, kajian mengenai kesenjangan tata kelola dan ketepatan sasaran di Kabupaten OKU Timur menjadi sangat relevan dan mendesak untuk dilakukan. Analisis ini penting tidak hanya untuk mengukur keberhasilan kebijakan secara permukaan, tetapi terutama untuk memastikan bahwa program bantuan sosial yang dibiayai oleh negara benar-benar menjangkau kelompok yang paling membutuhkan. Lebih dari itu, analisis ini akan mengungkap apakah penurunan angka kemiskinan yang terjadi telah didukung oleh sistem implementasi yang kredibel, transparan, dan akuntabel. Hanya melalui pendekatan yang komprehensif ini, pemerintah daerah dapat merancang intervensi yang lebih tepat sasaran, efisien, dan pada akhirnya berkontribusi nyata terhadap pengurangan kemiskinan yang berkelanjutan dan berkeadilan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus yang bertujuan untuk mengkaji secara mendalam kesenjangan tata kelola dan ketepatan sasaran dalam pelaksanaan program bantuan sosial di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak hanya berupaya mengukur capaian angka kemiskinan, tetapi juga menelaah proses, mekanisme, dan dinamika kelembagaan yang memengaruhi implementasi kebijakan di tingkat daerah. Studi kasus memungkinkan peneliti memahami fenomena secara kontekstual, khususnya dalam melihat bagaimana regulasi, kapasitas aparatur, dan sistem pendataan berinteraksi dalam praktik penyelenggaraan bantuan sosial.

Data utama dalam penelitian ini diperoleh selama pelaksanaan Magang I Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Kegiatan magang tersebut memberikan kesempatan kepada peneliti untuk terlibat secara langsung dalam aktivitas administrasi pemerintahan daerah, khususnya pada perangkat daerah yang menangani urusan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Melalui keterlibatan tersebut, peneliti memperoleh akses terhadap dokumen resmi seperti laporan pelaksanaan program bantuan sosial, daftar penerima manfaat berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), data rekapitulasi penyaluran bantuan, serta dokumen evaluasi internal. Selain itu, peneliti juga mengamati secara langsung proses verifikasi dan validasi data penerima di tingkat desa/kelurahan, termasuk mekanisme koordinasi antara pemerintah kabupaten dan aparat desa.

Untuk memperkuat analisis, penelitian ini juga menggunakan data sekunder berupa publikasi resmi Badan Pusat Statistik mengenai indikator kemiskinan, seperti persentase penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan (P1), dan indeks keparahan kemiskinan (P2). Data tersebut digunakan sebagai pembanding untuk melihat sejauh mana program bantuan sosial berkontribusi terhadap dinamika penurunan angka kemiskinan. Kombinasi antara data administratif hasil kegiatan magang dan data statistik resmi memungkinkan peneliti melakukan triangulasi sumber, sehingga interpretasi yang dihasilkan tidak hanya bersandar pada satu jenis data.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, observasi partisipatif terbatas selama kegiatan magang, serta wawancara semi-terstruktur dengan aparatur pemerintah daerah, perangkat desa, dan beberapa penerima manfaat. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi mengenai prosedur pendataan, kendala pematkharan DTKS, mekanisme pengawasan, serta persepsi masyarakat terhadap ketepatan sasaran bantuan sosial. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi kesenjangan antara ketentuan normatif kebijakan dan realitas implementasi di lapangan.

Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis. Proses analisis difokuskan pada identifikasi pola ketidaksesuaian antara regulasi dan praktik, termasuk kemungkinan terjadinya inclusion error dan exclusion error dalam

penyaluran bantuan sosial. Selain itu, penelitian ini juga mengevaluasi aspek tata kelola seperti transparansi, koordinasi antarinstansi, dan mekanisme pengawasan yang memengaruhi efektivitas program. Dengan pendekatan ini, penelitian berupaya memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana kualitas tata kelola daerah berdampak terhadap presisi kebijakan bantuan sosial dalam upaya penanggulangan kemiskinan

3. Hasil dan Diskusi

Bagian ini menguraikan temuan penelitian mengenai keterkaitan antara kualitas tata kelola dan ketepatan sasaran program bantuan sosial dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Analisis dilakukan dengan menempatkan indikator statistik kemiskinan dalam konteks implementasi kebijakan di tingkat daerah. Pendekatan ini bertujuan untuk melihat apakah penurunan angka kemiskinan yang tercatat benar-benar mencerminkan efektivitas sistem pengelolaan bantuan sosial, atau sekadar menunjukkan perbaikan administratif tanpa perubahan struktural yang mendalam.

Secara agregat, tingkat kemiskinan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur menunjukkan kecenderungan menurun dalam beberapa tahun terakhir dan berada pada kisaran di bawah 10 persen pada tahun 2024. Jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Sumatera Selatan yang masih berada pada angka di atas 11 persen, capaian kabupaten ini relatif lebih progresif. Namun demikian, apabila disandingkan dengan rata-rata nasional yang mendekati 9 persen, posisi daerah ini masih sedikit tertinggal. Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa meskipun terdapat perkembangan positif, kondisi kesejahteraan masyarakat belum sepenuhnya berada pada tingkat yang stabil dan kompetitif secara nasional.

Meskipun indikator makro memperlihatkan tren yang membaik, hasil kajian menunjukkan adanya sejumlah persoalan dalam praktik pelaksanaan program bantuan sosial yang dapat memengaruhi akurasi penargetan dan efektivitas kebijakan secara keseluruhan.

1. Dinamika dan Akurasi Data Penerima Manfaat

Temuan Utama

Temuan penelitian menunjukkan bahwa sistem pendataan penerima bantuan sosial belum sepenuhnya adaptif terhadap perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) masih cenderung bersifat administratif dan periodik, sehingga tidak selalu mampu menangkap dinamika ekonomi rumah tangga secara cepat.

Dalam konteks masyarakat yang sebagian besar bergantung pada sektor pertanian dan pekerjaan informal, perubahan pendapatan dapat terjadi secara fluktuatif. Namun perubahan tersebut tidak serta-merta tercermin dalam sistem pendataan. Akibatnya, terjadi ketidaksinkronan antara kondisi faktual dan status administratif penerima bantuan.

Situasi ini memunculkan potensi:

Inclusion error, yaitu ketika rumah tangga yang sudah relatif stabil secara ekonomi tetap menerima bantuan.

Exclusion error, yaitu ketika rumah tangga yang baru mengalami kerentanan belum masuk dalam daftar penerima.

Secara kritis, persoalan ini menunjukkan bahwa ketepatan sasaran sangat bergantung pada kualitas sistem informasi sosial. Tanpa pembaruan data yang lebih dinamis dan terintegrasi, bantuan sosial berisiko tidak sepenuhnya menjangkau kelompok yang paling membutuhkan.

2. Fragmentasi Koordinasi dan Tantangan Integrasi Sistem

Temuan Utama:

Koordinasi antarlevel pemerintahan masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya terintegrasi secara sistemik, sehingga memperlambat sinkronisasi data dan pengambilan keputusan.

Implementasi bantuan sosial melibatkan berbagai aktor kelembagaan, mulai dari tingkat kabupaten hingga desa. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme koordinasi masih bertumpu pada pelaporan manual dan prosedur birokrasi berjenjang. Meskipun mekanisme musyawarah desa mencerminkan aspek partisipatif, proses tersebut belum didukung oleh sistem digital yang terintegrasi secara menyeluruh.

Akibatnya, terdapat jeda waktu antara pengajuan, verifikasi, dan penetapan penerima bantuan. Keterlambatan ini tidak hanya berdampak pada kecepatan distribusi, tetapi juga pada konsistensi data antarinstansi. Ketika sistem informasi sosial belum terhubung secara real-time dengan data kependudukan dan ekonomi, maka kemungkinan terjadinya inkonsistensi meningkat.

Dari perspektif tata kelola publik, kondisi ini menunjukkan bahwa desentralisasi kebijakan sosial belum sepenuhnya diiringi dengan penguatan kapasitas sistem. Kewenangan yang dilimpahkan kepada daerah seharusnya diimbangi dengan infrastruktur informasi dan koordinasi yang memadai. Tanpa integrasi yang kuat, efektivitas kebijakan menjadi terfragmentasi dan kurang responsif terhadap perubahan sosial.

3. Orientasi Evaluasi yang Bersifat Administratif

Temuan Utama

Evaluasi program bantuan sosial masih berfokus pada kepatuhan prosedural dan capaian administratif, sementara pengukuran dampak kesejahteraan belum menjadi prioritas utama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan program umumnya diukur melalui indikator-indikator berikut:

Jumlah penerima manfaat yang terdaftar dan tersalurkan

Ketepatan waktu distribusi bantuan

Tingkat serapan anggaran

Kelengkapan laporan administrasi

Indikator tersebut memang penting dalam menjamin akuntabilitas dan tata kelola keuangan. Namun, indikator tersebut hanya mencerminkan keberhasilan pada level administratif, bukan efektivitas kebijakan dalam mengurangi kemiskinan secara mendalam.

Kesenjangan dalam Pengukuran Dampak

Evaluasi berbasis dampak belum dijadikan ukuran utama. Beberapa aspek yang seharusnya menjadi perhatian antara lain:

Perubahan pendapatan rumah tangga penerima

Peningkatan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan

Penguatan kapasitas ekonomi dan kemandirian penerima

Penurunan tingkat kerentanan ekonomi jangka panjang

Tanpa pengukuran pada aspek-aspek tersebut, sulit memastikan apakah bantuan sosial benar-benar meningkatkan kesejahteraan atau hanya mengurangi tekanan konsumsi secara sementara.

Implikasi terhadap Efektivitas Kebijakan

Pendekatan evaluasi yang terlalu administratif menimbulkan beberapa konsekuensi:

Program dinilai berhasil ketika distribusi selesai, meskipun dampaknya belum terukur.

Aparatur lebih terdorong mengejar target kuantitatif daripada kualitas intervensi.

Hubungan antara bantuan sosial dan penurunan kemiskinan menjadi sulit dibuktikan secara empiris.

Bantuan berisiko menjadi kebijakan kompensatoris, bukan transformasional.

Secara kritis, kondisi ini menunjukkan bahwa paradigma evaluasi masih berada pada level output, belum bergerak ke level outcome dan impact. Padahal, tujuan strategis bantuan sosial bukan sekadar menyalurkan dana, tetapi mendorong perubahan struktural dalam kondisi kesejahteraan masyarakat.

Jika orientasi evaluasi tidak bergeser menuju pendekatan berbasis dampak, maka penurunan angka kemiskinan yang terjadi berpotensi tidak sepenuhnya mencerminkan efektivitas kebijakan, melainkan dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti pertumbuhan ekonomi atau stabilitas harga komoditas.

Dengan demikian, reformulasi sistem evaluasi menjadi langkah mendesak agar bantuan sosial tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga relevan secara substantif dalam upaya pengurangan kemiskinan yang berkelanjutan.

4. Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyaluran Bantuan Sosial

Temuan penelitian menunjukkan bahwa dimensi transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur masih menghadapi sejumlah tantangan struktural yang signifikan. Informasi mengenai kriteria kelayakan penerima, mekanisme verifikasi, serta prosedur pembaruan data—yang

seringkali bersifat dinamis dan kompleks—belum sepenuhnya disampaikan secara terbuka dan sistematis kepada masyarakat. Dalam beberapa kondisi, publik hanya mengetahui hasil akhir berupa daftar penerima (calon penerima manfaat), tanpa memperoleh pemahaman yang memadai mengenai proses seleksi yang melatarbelakanginya. Keterbatasan akses informasi ini tidak hanya berpotensi memunculkan persepsi ketidakadilan, tetapi juga dapat menimbulkan gesekan sosial di tingkat masyarakat, terutama ketika terdapat warga yang merasa memenuhi kriteria namun tidak tercantum sebagai penerima bantuan. Situasi ini semakin diperparah oleh kurangnya sosialisasi yang berkelanjutan mengenai alasan perubahan data atau penghapusan nama dari daftar penerima, yang seharusnya menjadi bagian integral dari siklus akuntabilitas.

Dalam perspektif teori tata kelola pemerintahan (*good governance*), transparansi merupakan salah satu prinsip fundamental yang menentukan legitimasi kebijakan publik. United Nations Development Programme (UNDP, 1997) menekankan bahwa transparansi memungkinkan masyarakat memperoleh akses terhadap informasi yang relevan sehingga dapat berpartisipasi dan melakukan pengawasan secara efektif. Transparansi bukan sekadar ketersediaan data, melainkan juga kemudahan untuk memahami data tersebut. Tanpa keterbukaan informasi, hubungan antara pemerintah dan masyarakat cenderung bersifat satu arah, sehingga ruang partisipasi publik dalam mengoreksi kesalahan sasaran menjadi terbatas. Dalam konteks bantuan sosial, keterbukaan mengenai proses seleksi dan dasar penetapan penerima menjadi krusial untuk menjaga kepercayaan sosial dan mencegah konflik horizontal, yang sejalan dengan prinsip pemerintahan yang inklusif dan responsif.

Selain itu, dari sudut pandang teori akuntabilitas publik, akuntabilitas tidak hanya dimaknai sebagai kepatuhan terhadap prosedur administratif, tetapi juga sebagai pertanggungjawaban atas hasil kebijakan. Mark Bovens (2007) menjelaskan bahwa akuntabilitas publik mencakup dimensi *answerability* (kewajiban untuk menjelaskan) dan *enforceability* (kesiapan untuk menerima sanksi atau koreksi). Dalam praktiknya di OKU Timur, pengawasan program bantuan sosial masih lebih menekankan pada kelengkapan laporan dan realisasi anggaran—sebuah bentuk akuntabilitas prosedural—sementara evaluasi terhadap ketepatan sasaran dan dampak kesejahteraan, yang merupakan inti dari akuntabilitas substantif, belum sepenuhnya menjadi fokus utama. Fokus yang terlalu sempit ini mengaburkan tujuan hakiki dari bantuan sosial itu sendiri, yaitu peningkatan kesejahteraan.

Keterbatasan mekanisme pengaduan yang responsif juga memperlihatkan bahwa sistem koreksi belum berjalan optimal. Dalam teori partisipasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Sherry R. Arnstein (1969), tingkat partisipasi masyarakat dapat diukur dari sejauh mana publik memiliki ruang untuk memengaruhi keputusan, yang digambarkan dalam "tangga partisipasi". Jika masyarakat hanya menjadi penerima informasi tanpa memiliki saluran efektif untuk menyampaikan keberatan atau usulan perbaikan, maka partisipasi tersebut masih berada pada level simbolik, seperti rung "informasi" atau "konsultasi". Dalam konteks bantuan sosial, lemahnya sistem pengaduan—yang seringkali tidak transparan prosesnya dan lambat responsnya—dapat memperlambat koreksi terhadap kesalahan sasaran dan memperpanjang ketidaktepatan distribusi.

Secara analitis, keterbatasan transparansi dan akuntabilitas tidak hanya berdampak pada persepsi publik, tetapi juga pada efektivitas kebijakan itu sendiri. Tanpa sistem informasi yang terbuka dan mekanisme evaluasi yang substantif, sulit memastikan bahwa bantuan benar-benar menjangkau kelompok paling rentan. Lebih jauh lagi, kurangnya akuntabilitas substantif dapat mengaburkan hubungan antara tujuan kebijakan dan hasil yang dicapai. Program mungkin berjalan sesuai prosedur, namun belum tentu menghasilkan perubahan kesejahteraan yang signifikan, sehingga menggerus modal sosial dan kepercayaan publik kepada pemerintah dalam jangka panjang.

Dengan demikian, penguatan transparansi dan akuntabilitas menjadi prasyarat penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola bantuan sosial. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penyediaan informasi publik yang lebih terbuka mengenai kriteria dan proses seleksi melalui portal data terbuka atau papan pengumuman desa, penguatan sistem pengaduan yang cepat dan terverifikasi dengan nomor tiket pelacakan, serta evaluasi berkala berbasis dampak melalui mekanisme audit sosial. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *good governance* yang menempatkan keterbukaan, partisipasi, dan pertanggungjawaban sebagai fondasi utama kebijakan publik yang adil dan berkelanjutan.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur—yang pada tahun 2024 berada pada kisaran 9,75 persen dan relatif lebih baik dibanding rata-rata Provinsi Sumatera Selatan—tidak serta-merta mencerminkan efektivitas tata kelola program bantuan sosial secara komprehensif. Meskipun tren tersebut menunjukkan perkembangan positif, posisi daerah yang masih sedikit berada di atas rata-rata nasional mengindikasikan bahwa capaian tersebut belum sepenuhnya mencerminkan transformasi kesejahteraan yang mendalam dan berkelanjutan. Dengan kata lain, perbaikan statistik belum tentu identik dengan perbaikan struktural. Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa persoalan mendasar terletak pada kualitas tata

kelola, khususnya dalam aspek akurasi data, integrasi kelembagaan, orientasi evaluasi, serta transparansi dan akuntabilitas. Ketidaksinkronan antara dinamika sosial ekonomi masyarakat dan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) membuka ruang terjadinya inclusion error dan exclusion error. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pendataan yang belum adaptif berpotensi mengurangi presisi kebijakan. Dalam perspektif teori targeting dalam kebijakan sosial, efektivitas intervensi sangat ditentukan oleh kemampuan sistem untuk mengidentifikasi kelompok sasaran secara akurat dan responsif terhadap perubahan. Ketika basis data tidak diperbarui secara dinamis, maka bantuan sosial cenderung kehilangan ketepatan fungsionalnya. Selain itu, fragmentasi koordinasi antarinstansi memperlihatkan bahwa desentralisasi kebijakan sosial belum sepenuhnya diimbangi dengan penguatan kapasitas institusional dan integrasi sistem informasi. Sebagaimana dikemukakan Oates dalam teori desentralisasi fiskal, pelimpahan kewenangan kepada daerah hanya akan efektif apabila didukung oleh kapasitas administratif yang memadai. Tanpa infrastruktur data yang terintegrasi dan mekanisme koordinasi yang efisien, kebijakan menjadi rentan terhadap inkonsistensi dan keterlambatan implementasi. Hal ini mengindikasikan bahwa tantangan tata kelola bukan hanya bersifat teknis, melainkan juga struktural. Orientasi evaluasi yang masih berfokus pada indikator administratif turut memperkuat temuan bahwa bantuan sosial lebih dinilai dari sisi distribusi daripada dampaknya. Evaluasi yang berhenti pada tingkat output—seperti jumlah penerima dan serapan anggaran—tidak cukup untuk menilai keberhasilan program dalam mengurangi kemiskinan secara berkelanjutan. Dalam kerangka evaluasi kebijakan publik, pengukuran seharusnya bergerak menuju level outcome dan impact, yaitu perubahan nyata dalam pendapatan, kapasitas ekonomi, serta pengurangan kerentanan jangka panjang. Tanpa pergeseran paradigma evaluasi, bantuan sosial berisiko menjadi kebijakan kompensatoris yang hanya menjaga stabilitas konsumsi sementara, bukan mendorong mobilitas sosial. Dimensi transparansi dan akuntabilitas juga menjadi faktor kunci dalam menentukan legitimasi kebijakan. Prinsip good governance menekankan pentingnya keterbukaan informasi, partisipasi publik, dan pertanggungjawaban substantif. Keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi mengenai kriteria dan proses seleksi penerima dapat melemahkan kepercayaan sosial, meskipun secara administratif prosedur telah dijalankan. Dalam konteks ini, akuntabilitas tidak hanya berarti kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga kemampuan pemerintah untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan hasil kebijakan secara terbuka. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas program bantuan sosial di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola yang melandasinya. Penurunan angka kemiskinan yang terjadi belum sepenuhnya dapat diatribusikan pada presisi kebijakan bantuan sosial, karena faktor eksternal seperti pertumbuhan ekonomi lokal dan stabilitas harga komoditas turut berperan. Oleh karena itu, penguatan tata kelola menjadi agenda strategis yang tidak dapat ditunda. Reformasi yang diperlukan mencakup pemutakhiran data yang lebih dinamis dan berbasis teknologi, integrasi sistem informasi lintas sektor, penguatan mekanisme evaluasi berbasis dampak, serta peningkatan transparansi dan partisipasi masyarakat. Pendekatan yang lebih terintegrasi dan akuntabel akan meningkatkan ketepatan sasaran sekaligus memperkuat legitimasi kebijakan di mata publik. Dengan demikian, bantuan sosial tidak hanya berfungsi sebagai instrumen distribusi sumber daya, tetapi juga sebagai mekanisme transformasi sosial yang mampu mendorong pengurangan kemiskinan secara berkelanjutan dan berkeadilan.

Referensi

1. Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>
2. Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. (2024). *Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dalam angka 2024*. BPS Kabupaten OKU Timur.
3. Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. (2024). *Profil kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024*. BPS Provinsi Sumatera Selatan.
4. Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. (2024). *Profil kemiskinan di Indonesia Maret 2024*. BPS RI.
5. Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework. *European Law Journal*, 13(4), 447–468. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2007.00378.x>
6. Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
7. Mansuri, G., & Rao, V. (2013). *Localizing development: Does participation work?* World Bank Publications.
8. Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
9. Oates, W. E. (1999). An essay on fiscal federalism. *Journal of Economic Literature*, 37(3), 1120–1149. <https://doi.org/10.1257/jel.37.3.1120>
10. Sumarto, S., Suryahadi, A., & Yumna, A. (2019). Social protection reform in Indonesia: Progress and challenges. *Asian Economic Policy Review*, 14(1), 19–36. <https://doi.org/10.1111/aep.12237>
11. United Nations Development Programme (UNDP). (1997). *Governance for sustainable human development*. UNDP Policy Document.
12. arrientos, A., & Hulme, D. (2008). Social protection for the poor and poorest in developing countries: Reflections on a quiet revolution. *Oxford Development Studies*, 36(3), 279–297. <https://doi.org/10.1080/13600810802262720>
13. Besley, T., & Kanbur, R. (1993). Principles of targeting. In M. Lipton & J. van der Gaag (Eds.), *Including the poor: Proceedings of a symposium organized by the World Bank and the International Food Policy Research Institute* (pp. 67–90). World Bank.
14. Cornwall, A. (2008). Unpacking 'participation': Models, meanings and practices. *Community Development Journal*, 43(3), 269–283. <https://doi.org/10.1093/cdj/bsn010>

15. Grindle, M. S. (2004). Good enough governance: Poverty reduction and reform in developing countries. *Governance*, 17(4), 525–548. <https://doi.org/10.1111/j.0952-1895.2004.00256.x>
16. Hickey, S., & Mohan, G. (2004). *Participation: From tyranny to transformation? Exploring new approaches to participation in development*. Zed Books.
17. Howlett, M., Ramesh, M., & Perl, A. (2009). *Studying public policy: Policy cycles and policy subsystems* (3rd ed.). Oxford University Press.
18. Kabeer, N. (2006). Social exclusion and the MDGs: The challenge of 'durable inequalities'. *IDS Bulletin*, 37(3), 64–78.
19. Lipsky, M. (2010). *Street-level bureaucracy: Dilemmas of the individual in public services* (30th anniversary ed.). Russell Sage Foundation.
20. OECD. (2018). *Social protection system review of Indonesia*. OECD Publishing.
21. Ravallion, M. (2009). How relevant is targeting to the success of an antipoverty program? *World Bank Research Observer*, 24(2), 205–231. <https://doi.org/10.1093/wbro/lkp003>
22. Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press.
23. World Bank. (2012). *Targeting poor and vulnerable households in Indonesia*. World Bank Report.
24. World Bank. (2020). *Indonesia economic prospects: The long road to recovery*. World Bank.